

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN TIMUR

Yuli Wahyuni¹, Danna Solihin², Rina Masithoh Hariyadi³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : @gmail.com

Keywords :

Financial Accounting Standards for Entities Without Accountability, Cooperative Financial Statements

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the application of Financial Accounting Standards for Entities Without Accountability (SAK ETAP) in the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative in 2019. This research was conducted at the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative, with the problem being investigated, the authors focused on the application of SAK-ETAP covering the recognition of: Assets, Debts, Revenues, Expenses, Profit/Loss; measurement : Historical Expenses and Fair Value; presentation of : Balance Sheet, Profit/Loss, Changes in Equity and Profit/Loss and Retained Earnings, Cash Flows and Notes to Financial Statements; Disclosure for the period 2019. The analytical tool in this study compares the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative with SAK ETAP. Based on the results of the research, the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative in 2019 are sufficient in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Accountability (SAK ETAP). However, the financial reporting data made by the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative in 2018 and 2019 based on SAK ETAP is still lacking, namely the financial statements only consist of 2 components, the balance sheet element only consists of 6 items and the profit/loss element consists of 2 items.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perusahaan maupun koperasi di era yang memasuki globalisasi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup usahanya untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan tantangan dunia bisnis. Indonesia memiliki koperasi dengan landasan hukum dengan diakuinya koperasi merupak satu diantara bentuk organisasi yang turut aktif dalam perekonomian rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat 1, dijelaskan koperasi yang ada di Indonesia sebagai badan usaha dalam bentuk kelompok dengan anggota individu berlandaskan badan hukum yang mana aktivitasnya sesuai dengan prinsip perkoperasian, dimana koperasi ini menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat dengan asas bersifat kekeluargaan.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini juga dijelaskan tujuan didirikan koperasi unruk peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus para anggota koperasi terkait serta berperan turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga terciptanya masyarakat sejahtera, makmur, adil dan maju yang mengacu pada pancasila serta UUD. Dari

tujuan tersebut membuat koperasi dalam pengelolaannya harus profesional dan benar. Dikarenakan dapat menjadi patokan koperasi yang berjalan kinerjanya dikatakan sehat atau tidak sehat. Kategori koperasi sehat yang mana dikelolanya semua kegiatan dikoperasi dengan sesuai standar termasuk untuk informasi keuangan melalui pelaporan. Untuk itu, bidang akuntansi koperasi menjadi penting dalam mengatasi permasalahan manajemen koperasi. Sehingga keuangan koperasi dilihat dari sudut pandang akuntansi koperasi sering dilakukan fokus tinjauan dan kajian.

Melalui tinjauan dan kajian mengenai koperasi yang selalu mengutamakan keuntungan dalam setiap usahanya, namun juga diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat membantu pemenuhan keperluan para anggota koperasi tersebut. Koperasi yang mengacu pada motif keuntungan dalam kegiatannya membuat tidak berbedanya peran kedudukan Sisa Hasil Usaha (SHU) maupun laba untuk lembaga yang lain. Walaupun perkoperasian memiliki peran dan kedudukan yang sejajar pada lembaga lainnya dalam pembangunan dalam sektor ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi, maka koperasi diinginkan mampu mengalami perkembangan dengan sehat dan dapat sejajar organisasi lainnya. Untuk itu koperasi perlu penilaian keuangan berdasarkan akuntansi melalui data keuangan yang diolah sehingga adanya sistem keuangan terperinci dalam informasinya, agar memiliki dalam untuk menentukan kebijakan ekonomi agar terciptanya peningkatan mutu dalam mengelola koperasi.

Koperasi dalam pelaksanaannya dilakukan Rapat Anggota Tahunan pada akhir periode setahun sekali, untuk evaluasi perkembangan kinerja koperasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan koperasi diwaktu bersangkutan. Melalui rapat yang dilaksanakan tersebut, dilaporkannya seluruh pelaksanaan kegiatan termasuk laporan keuangan. Sistem informasi keuangan ini wujud pertanggungjawaban pengelolaan koperasi dalam aspek keuangan. Data keuangan pelaporannya harus terstruktur berlandaskan standar yang berlaku dalam bidang akuntansi keuangan.

Standar akuntansi koperasi sebagai patokan berperan penting mengenai pembuatan informasi keuangan pada koperasi. Hal ini bertujuan agar semua bagian berkaitan pada koperasi terkait mampu paham tentang informasi keuangan. Adapun standar akuntansi koperasi yang dibuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Sekarwati, 2018:21). Adapun Permenkop dan UKM RI Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dalam pasal 3 yang dijelaskan oleh Lambey (2015:55), menuntut seluruh koperasi tanpa akuntabilitas publik dalam laporan keuangannya wajib mengacu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Adapun SAK-ETAP telah diputuskan oleh IAI dalam rangka mudahnya koperasi dan UKM pemberian informasi data keuangan yang penyusunannya mengikuti standar.

SAK-ETAP mudah digunakan dan tidak memperberat penyelenggaranya. Diberlakukannya SAK-ETAP timbul harapan koperasi dapat memberi penggambaran kinerja untuk tiap periode baik yang sudah lama ataupun dimasa depan, maka kualitas informasi keuangannya terjadi peningkatan. Turut pula mewujudkan tujuan koperasi dalam pembangunan tatanan ekonomi nasional dengan optimal. Namun, sekarang koperasi masih sering mengalami permasalahan berupa kurang pegawai yang paham tentang SAK ETAP. Dimana pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi tentang SAK ETAP kepada pengurus koperasi, sehingga terjadinya penyajian laporan keuangan tidak sesuai SAK ETAP (Andreas, 2016: 16).

Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur merupakan koperasi yang memberikan banyak manfaat bagi para anggotanya. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang didirikan dan dianggotai oleh para Polri, PNS dan THL yang ada dilingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Timur baik yang masih aktif

maupun yang sudah MPP dengan anggota tahun 2018 berjumlah 540 orang, sehingga diharapkan mampu untuk menumbuhkembangkan ekonomi para anggota.

Berdasarkan studi pendahuluan kondisi sebenarnya yang terjadi menunjukkan bahwa pada 5 (lima) laporan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2014-2018 diketahui belum adanya pengungkapan pelaporan arus kas maupun promosi dari ekonomi tiap anggota koperasi. Laporan Sisa Hasil Usaha ternyata belum dilaporkannya dengan terpisah setiap pendapatan dari tiap anggota. Dimana Polda Kalimantan Timur belum pernah dilakukan penilaian buku keuangan masuk dan keluarnya dibuat sesuai SAK ETAP. Padahal koperasi dinilai baik jika laporan yang dibuat berdasarkan SAK-ETAP yang menjadi penting diterapkan koperasi untuk dapat meningkatnya penilaian koperasi sehingga berdampak pada meningkatnya anggota percaya pada pelaksanaan koperasi tersebut dengan menyimpan dana dalam koperasi terkait untuk dikelola.

Belum sesuai laporan tersebut menurut SAK-ETAP dapat menyebabkan pihak yang memerlukan informasi tersebut kurang percaya terhadap kegiatan pada koperasi, sehingga partisipasi anggota terhadap koperasi terjadi penurunan. Maka koperasi perkembangannya akan terhambat mulai dari volume usaha, aset dan juga SHU. Untuk itu pentingnya penerapan SAK-ETAP.

Sesuai permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntansi keuangan menurut Kieso, et al (2016:2) adalah *accounting consist of the three basic activities it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interestusers. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accountingreports arecalledfinancial statement.* Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Hipotesis penelitian yaitu laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP).

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Akuntansi perkoperasian merupakan sistem pelaporan data keuangan untuk koperasi terdapat catatan, klasifikasi dan penafsiran.
2. SAK ETAP adalah suatu standar pembuatan pelaporan data keuangan bagi entitas yang tidak ada akuntabilitas publiknya.
3. Pengakuan adalah diungkapnya pelaporan data keuangan bersifat komparatif tiap periode meliputi pemberian data keuangan melalui dasar akrual meliputi aktiva, hutang dan ekuitas, penghasilan dan beban serta laba rugi berlandaskan SAK ETAP.

4. Pengukuran adalah ditetapkannya jumlah dana dipergunakan entitas dalam pengukuran aktiva, hutang, pendapatan dan biaya dengan dasar diukurnya berupa biaya historis serta nilai wajar.
5. Penyajian adalah disajikannya data keuangan untuk entitas dengan wajar termasuk dibuat pernyataan eksplisit pada catatannya.
6. Pengungkapan adalah sebagai dasar diukurnya data keuangan tersusun dalam pemahaman yang mendukung pos-pos dalam laporan keuangan.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, dengan permasalahan diteliti, maka penulis berfokus pada diterapkannya SAK-ETAP meliputi pengakuan : Aktiva, Hutang, Pendapatan, Beban, Laba/rugi; pengukuran : Beban Historis dan Nilai Wajar; penyajian : Neraca, Laba/Rugi, Perubahan Ekuitas dan Laba/Rugi serta Saldo Laba, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; Pengungkapan periode 2019.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019.
2. Struktur organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019.
3. Laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 meliputi :
 - a. Perhitungan Hasil Usaha Komparatif Per 31 Desember 2019
 - b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif Per 31 Desember 2019
 - c. Laporan Perubahan Modal
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung objek penelitian yakni Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
 - b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap bagian yang terkait dan berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang memadai. Wawancara dilakukan dengan pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik yang dilakukan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari dokumen dan catatan tentang instansi yang diteliti atau menyalin catatan atas dokumen yang berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis berupa gambaran umum, struktur organisasi dan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

Alat Analisis

Alat analisis merupakan salah satu unsur terpenting dari suatu penelitian dimana penentuan alat analisis secara tepat sangat penting agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan, maka penulis menggunakan alat analisis yang sesuai dengan permasalahan. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Alat analisis pada penelitian ini membandingkan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dengan SAK ETAP. Kemudian dilaksanakan perhitungan menurut Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302) dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\Sigma \text{Total Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan di atas berguna untuk pengambilan simpulan, seperti yang telah dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302) :

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan belum sesuai
26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai
51% - 75%	Dikategorikan cukup sesuai
76% - 100%	Dikategorikan sangat sesuai

Sumber : Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302)

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini dikatakan diterima jika : laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 sudah sesuai ($\geq 51\%$) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) dan hipotesis penelitian ini dikatakan ditolak jika : laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 belum sesuai ($< 51\%$) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Keanggotaan Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim pada dasarnya diberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan kata lain anggota yang masuk sebagai anggota Koperasi adalah sukarela (demokratis) tanpa ada tekanan dan paksaan. Untuk itu keanggotaan Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim adalah Polri, PNS, PHL, yang ada dilingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kaltim baik yang masih aktif maupun yang sudah MPP. Anggota Koperasi pada tahun buku 2018 sejumlah 540 orang dan tahun buku 2019 berjumlah 518 orang berarti turun sebanyak 22 orang.

Perbandingan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dengan SAK ETAP yakni :

Tabel 2.
Perbandingan Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur

No	Elemen- Elemen	SAK ETAP	Laporan Keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Komponen Laporan Keuangan	1. Neraca a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti, investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud g. Utang usaha dan utang lainnya h. Aset dan kewajiban	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Berdasarkan perhitungan menurut Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302) dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\Sigma \text{Total Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{27}{36} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 75\%$$

Artinya nilai perbandingan sebesar 75% diantara 51-75% yang artinya cukup sesuai, sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan diterima karena laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun elemen-elemen pelaporannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri 2 komponen meliputi Neraca dan Laba Rugi sedangkan pada SAK ETAP terdapat 5 komponen yaitu Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehingga laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 3 komponen meliputi Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur belum sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan elemennya.

Dilihat dari elemen pengakuan diketahui pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan basis akrual yang mana pencatatan penghasilan dan beban untuk periode saat terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan. Maka pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah sesuai pada SAK ETAP berdasarkan pengakuan menggunakan basis akrual.

Untuk elemen pengukuran diketahui laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan biaya historis yaitu untuk aktiva tetap yang harusnya pengukuran mengacu beban diperolehnya serta perhitungan akumulasi diukur pada saat tanggal perolehan. Maka pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah sesuai pada SAK ETAP berdasarkan pengukuran menggunakan biaya historis.

Pada elemen neraca diketahui pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri 6 pos yaitu Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, Persediaan, Aset tetap, hutang usaha dan hutang lainnya dan Ekuitas. Sedangkan pada SAK ETAP terdapat 10 komponen yaitu Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, Persediaan, Properti dan investasi, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Utang usaha dan utang lainnya, Aset dan kewajiban pajak, Kewajiban di estimasi dan Ekuitas. Maka pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 4 pos pada neraca meliputi Properti dan investasi, Aktiva tidak berwujud, Aktiva Total dan kewajiban pajak, Kewajiban di estimasi. Membuat pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur belum sesuai pada SAK ETAP berdasarkan neraca.

Adapun elemen laba rugi diketahui pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri 2 pos yaitu penghasilan dan biaya keuangan. Sedangkan pada SAK ETAP terdapat 5 komponen yaitu Penghasilan, Biaya akibat transaksi keuangan, laba/rugi proses investasi dengan ekuitas, Biaya pajak dan Laba/rugi netto. Sehingga pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 3 pos pada laba rugi meliputi laba/rugi dari investasi dengan ekuitas, pajak dan Laba/rugi netto. Maka, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur belum sesuai pada SAK ETAP berdasarkan laba rugi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan adalah laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 sudah cukup sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun data pelaporan keuangannya yang dibuat Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019 berdasarkan SAK ETAP masih kurang karena hanya terdiri 2 komponen meliputi Neraca dan Laba Rugi sedangkan pada SAK ETAP terdapat 5 komponen yaitu Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehingga laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 3 komponen meliputi Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur belum sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan elemennya.

Saran

1. Sebaiknya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur melakukan pembuatan data keuangan tersusun berlandaskan SAK ETAP seperti memasukkan pajak 15% pada perhitungan SHU, membuat laporan perubahan modal, membuat arus kas serta catatan dari pelaporan data keuangannya sehingga laporan keuangannya dihasilkan lengkap dan mudah dipahami pada pihak terkait.
2. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diharapkan melakukan pencatatan secara lengkap mengenai aktivitas operasinya, melakukan siklus akuntansi dengan lengkap dan melakukan klasifikasi pos-pos secara benar untuk mempermudah disusunnya laporan keuangan melalui pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan berlandaskan SAK ETAP.
3. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diharapkan mampu memiliki SDM yang mengerti serta dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berlandaskan SAK ETAP agar penerapannya didalam pelaporan keuangan dapat terus berlanjut ke periode-periode berikutnya.
4. Bagi peneliti lain diharapkan melakukan penelitian dengan obyek koperasi lainnya dengan penilaian pelaksanaan SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Beth Sianne. 2016. *Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY.
- Koswara, dkk. 2011. *Dean J. Champion : Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Reefika Aditama.
- Lambey. 2015. *Evaluasi penyajian Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal EMBA Vol 9 No. 3.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Sekarwati, Ayu Muji Sri. 2018. *Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemasan semen gresik (iksg)*. Jurnal Inovoasi Volume 14 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.